

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN WONOSOBO

Budhi Cahyono

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

budhicahyono@yahoo.com

ABSTRACT

Dimensions of social capital described everything that makes people allied to achieve a common goal based on unity, and bounded by the values and norms that grow and obeyed, as well as the social relations inherent in social structures and social networks in a community that creates wide range of social obligations, creating a climate of mutual trust, bring information channels, and establish norms and social sanctions for members of the community (Coleman , 1999). However, Fukuyama (2000) says that not necessarily the norms and shared values are guided by reference behave, act, and behave it automatically becomes social capital. However, only the norms and shared values based on trust. Where trust is build from expectations, honesty, and cooperative behavior emerging from within a community based on shared norms shared by its members. The population consisted of tobacco farmers, community leaders, and government officials from eight districts and rural villages are selected as samples. While the number of respondents were 104 people , consisting of 80 tobacco farmers, 16 community leaders, 16 of the village, sub-district and 2 devices. Variables research includes the study of economic, social cultural, demographic, tobacco farmers, and the effectiveness of social capital. Data collection using focus group discussions (FGD) with the respondent, and field observations. The results showed that the values of trust in social capital is dominant as the basis for rural communities to be used as based on improvement of other functions, such as increased respect and mutual benefit. Problems in the optimization problem concerning the nature of social capital, human resource issues, and management issues. The main problems to optimize the role of social capital in rural areas need the support of various stakeholders, and the demands of rural communities regarding the importance of mentoring programs to improve the competence of rural communities by improving farming skills, and improve agricultural diversification. In addition, the need for transformational leadership support to improve the optimization of the role of social capital .

Keywords : *social capital, welfare, transformational leadership, mentoring*

PENDAHULUAN

Problem kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya. Gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan

pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya, orientasi kepada pertumbuhan dicoba untuk diseimbangkan dengan orientasi pada pemerataan, salah satunya tampak pada program-program spesifik penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh beberapa hal, antara

lain: rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serapan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja, minimnya infrastruktur menyebabkan aksesibilitas ke/dari sumber perekonomian daerah, kesenjangan desa dan kota, ketimpangan penguasaan tanah, kultur masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Asumsi paradigma ini adalah pertumbuhan tidak cukup sehingga perlu ada kebijakan distribusi dan redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Pada perkembangan berikutnya terjadi pergeseran paradigma ke arah pemberdayaan masyarakat, dimana orang miskin tidak lagi dilihat sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku pembangunan, dan proses pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsep *people centered development* dan *bottom-up development planning* menjadi wacana pembangunan yang banyak diadopsi dalam proses kebijakan publik. Sebagai kelanjutan dari paradigma pemberdayaan masyarakat berkembang wacana pengutamaan kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan harus didekati melalui penerapan strategi yang komprehensif yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan juga keamanan (Darwin, 2005).

Modal sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan anggotanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, yang meyakini bahwa modal sosial merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian

anggotanya. Oleh Alder dan Kwon (2000) disebutkan bahwa modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Dasgupa dan Serageldin (1999), dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Sementara itu, Coleman (1999) juga menekankan bahwa dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran reformasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat. Berbeda dengan pendapat Fukuyama (1995), yang menyatakan bahwa norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku otomatis menjadi modal sosial. Modal sosial yang sebenarnya hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*), dimana *trust* merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Dimensi modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga perlu pengembangan nilai-nilai yang harus dianut oleh anggotanya, seperti: sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan saling percaya mempercayai.

Masalah Penelitian

Dimensi modal sosial menggambarkan

segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). Dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999). Namun demikian Fukuyama (1995, 2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya.

Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan. Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif,

sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru, yang jati diri modal sosial yang sebenarnya.

KAJIAN PUSTAKA

Modal Sosial

Supriono (2008) menyatakan modal sosial merupakan hubungan hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama. Coleman (1999), modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Burt (1992) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta

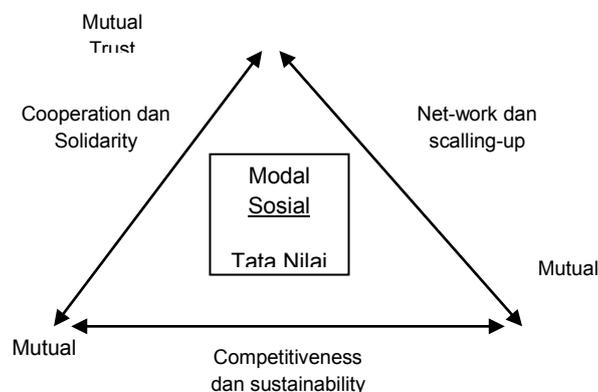
dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Pada jalur yang sama Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Adapun menurut Cohen dan Prusak L. (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.

Aspek kepercayaan menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di pedesaan, sementara aspek lainnya (kerjasama, jaringan kerja), tidak akan terbentuk dengan

baik jika tidak dilandasi oleh terbentuknya hubungan saling percaya (mutual-trust) antar anggota masyarakat. Kekuatan kerjasama dan jaringan kerja yang terbentuk di masyarakat adalah pengembangan operasional dan hubungan saling percaya antar anggota masyarakat di bidang sosio-budaya, ekonomi dan pemerintahan. Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertian kepercayaan seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas atau intrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan intersubjektif.

Terbentuknya saling percaya menurut (Pranaji, 2006) adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetangaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Pada suatu masyarakat ketetangaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif.

Tata nilai yang tampak dalam masyarakat umumnya bisa dilihat dari empat hal: (1) Ditegakkannya sistem sosial di pedesaan yang berdaya saing tinggi (produktif) namun berwajah humanistik (tidak eksploitatif dan intimidatif terhadap sesama manusia atau



Gambar 1
Tata-nilai sebagai Inti Pembentuk Modal Sosial

masyarakat). (2) Ditegakkannya sistem keadilan yang dilandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (tidak imperialistik dan menegasi kehidupan sosial). (3) Ditegakkannya sistem solidaritas yang dilandaskan pada hubungan saling percaya (mutual trust) antar elemen pembentuk sistem masyarakat. (4) Dikembangkannya peluang untuk mewujudkan tingkat kemandirian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang merupakan salah satu bagian terpenting keberadaan suatu masyarakat.

Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan masyarakat adalah sebuah usaha praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial serta dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sebagai sebuah aksi sosial dalam menyelesaikan problem sosial, pengembangan masyarakat memberi perhatian yang besar pada perubahan masyarakat, yakni perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dimulai dari tingkat personal masyarakat, sampai pada level sosial melalui perubahan institusi sosial yang ada dalam masyarakat.

Perubahan menyangkut dua pelaku yang berbeda, yaitu masyarakat dan individu. Perubahan sosial harus diawali dari perubahan individu, dan secara berangsur-angsur, perubahan individu harus disusul dengan perubahan struktural. Perubahan masyarakat akan terlaksana bila dipenuhi dua syarat pokok: (a) adanya nilai atau ide; dan (b) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai tersebut. Pertama, manusia adalah pelaku yang menciptakan sejarah, tujuannya gambaran masa depan yang telah ada dalam benak manusia. Syarat kedua, perubahan masyarakat adalah adanya nilai-nilai atau ide. Nilai terpenting yang mendasari serta mengarahkan seluruh aktivitas manusia lahir dan batin.

Dalam kedudukannya sebagai totalitas,

manusia memiliki sisi luar atau tingkah laku, dan dari sisi dalam atau kepribadian. Dalam sistem kehidupan manusia, sisi luar akan dipengaruhi oleh sisi dalam, tingkah laku dipengaruhi oleh kepribadian. Sementara itu sisi dalam manusia memiliki kecenderungan pada hal-hal yang baik dan keburukan, sehingga kecenderungan ini akan berpengaruh pada sisi luar manusia yang nampak pada perbuatannya. Dengan kata lain, sisi luar manusia dipengaruhi oleh tingkat kualitas sisi dalamnya. Posisi hati mempunyai peran sebagai penggerak, karena dalam hati terdapat potensi memahami, berpikir, merasa dan kemauan. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan pada individu-individu dilakukan dengan mengubah kualitas diri, yakni dengan meningkatkan potensi manusia untuk memahami, berpikir, merasa dan potensi kemauan mereka untuk melakukan perubahan. Peningkatan sisi dalam manusia untuk mencapai kualitas yang tinggi haruslah didasarkan ide atau nilai yang menjadi dasar dalam mengarahkan manusia, dan setiap masyarakat pasti memiliki nilai atau norma yang mereka yakini sebagai ideal. Nilai-nilai moral tersebut akan menjadi gambaran masyarakat tertentu.

Setelah terbentuk pribadi-pribadi yang mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga dapat mendorong individu untuk menggerakkan potensi sikap, berpikir, merasa dan berkemauan, maka berangsur-angsur perubahan individu tersebut akan disusul dengan perubahan sosial. Menurut Jalaluddin Rahmat (2007), perubahan sosial adalah perubahan institusional, dan dalam prakteknya lebih ditujukan pada perubahan struktur sosial yang timpang, hegemonik dan dominatif atau perubahan struktur sosial yang akan dibangun. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi sosial, yaitu bagaimana organisasi sosial berhubungan dengan organisasi sosial yang lain dan masyarakatnya, individu yang menjadi bagian dari struktur yang ada.

Perubahan institusional dengan mengubah struktur sosial dibutuhkan upaya

kolektif semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kesadaran individual yang telah tercapai harus diikuti dengan penyadaran masyarakat. Perubahan masyarakat akan sulit tercapai bila hanya menekankan pada salah satu dari dua dimensi, manusia dan struktur sosial dalam masyarakat. Keduanya harus diubah, karena memiliki sifat saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Kesadaran individu-individu akan mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perubahan, dan sebaliknya struktur atau tatanan sosial yang baik dapat menciptakan kepribadian individu-individu yang baik pula.

Studi Pendahuluan

Budhi dan Ardian (2009) mengidentifikasi menemukan adanya masalah yang kompleks di Kabupaten Wonosobo. Permasalahan bidang sosial budaya, antara lain: masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya petani tembakau, yaitu antara SD sampai SLTP. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan pola hidup yang kurang sehat, gizi masyarakat rendah, dan sarana/prasarana kesehatan yang masih kurang memadai. Permasalahan bidang lingkungan yaitu semakin berkembangnya usaha pertambangan darat baik secara individu maupun kelompok, pada kecamatan-kecamatan tertentu (Kecamatan Kertek, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Mojotengah) yang tentunya dalam jangka panjang akan merusak ekosistem dan penurunan kualitas sumberdaya alam dan makin berkurangnya kawasan terbuka karena desakan kebutuhan ekonomi sesaat yang membuat masyarakat mengeksploitasi sumberdaya alam secara terus-menerus dan melampaui kemampuan daya dukungnya. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya lahan yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya atau terdegradasinya sumberdaya alam secara menyeluruh.

Permasalahan daerah Kabupaten

Wonosobo seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo (tahun 2006-2010), antara lain: permasalahan bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Permasalahan bidang ekonomi meliputi: Pertama, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo, yaitu 2,1% per tahun sehingga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang mengindikasikan tingkat produktivitas masyarakat masih rendah sehingga belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kedua, masih tingginya tingkat kemiskinan dengan jumlah keluarga pra sejahtera mencapai 57,3% pada tahun 2005. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja, nilai ekspor non-migas yang cenderung mengalami penurunan, belum berkembangnya sektor pariwisata yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah kunjungan wisata yang mencapai 6,36% per tahunnya.

Kajian yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo (2006), menunjukkan bahwa masalah utama kemiskinan adalah: keterbatasan, kepemilikan aset, dan minimnya infrastruktur, informasi dan kapabilitas SDM. Aspek ketidakberdayaan masyarakat sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kapabilitas untuk menuju pada penghidupan yang lebih baik. Ketidakberdayaan disebabkan oleh kebijakan sektoral yang belum sepenuhnya difokuskan atau berpihak pada masyarakat miskin, misalnya: sektor pendidikan, sektor kesehatan, program-program pemerintah (BLT, SPP gratis, Dana BOS). Biaya pendidikan sudah dibantu oleh pemerintah, namun untuk keperluan uang saku dan transport masih kesulitan, mengingat jarak rumah ke sekolah mereka cukup jauh. Tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini berkaitan dengan perilaku hidup mereka yang tidak sehat. Upaya masyarakat miskin untuk menjaga kesehatan juga terhambat oleh

rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Jarak dan biaya merupakan faktor utama yang menentukan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah terhadap komunitas miskin sedikit membantu mereka, namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga komunitas miskin malah tidak mendapatkan manfaatnya. Program BLT cenderung menjadikan orang berlomba-lomba untuk disebut miskin karena berharap akan mendapatkan bantuan.

Keterbatasan masyarakat terhadap kepemilikan asset dan akses lahan menjadi masalah utama penyebab kemiskinan. Kepemilikan lahan masyarakat yang hanya kurang dari 0,25 hektar dan banyak pula yang tidak memiliki lahan garapan, sulit bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya dari tanah pertanian dengan hasil pertanian yang sedikit, dan mereka cenderung menjadi buruh tani.

Akses permodalan dan informasi juga sebagai penyumbang kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Ketiadaan dana menjadi penyebab si-miskin susah keluar dari kemiskinan. Upaya meminjam ke bank selalu ditolak karena mereka tidak memiliki agunan. Jalan keluarnya mereka meminjam ke koperasi dengan bunga yang dirasa besar, atau ke tengkulak dengan sistem ijon. Hasil panen mereka akan dibeli oleh si peminjam. Dampak yang terjadi mereka tidak memiliki posisi tawar dalam harga, karena harga ditentukan oleh tengkulak. Alasan meminjam ke tengkulak di satu sisi ada kemudahan, namun di sisi lain mereka akan terlilit hutang. Selain itu kurangnya informasi mengakibatkan komunitas miskin tidak tahu prosedur meminjam dana. Sementara itu akses pasar bagi komunitas miskin saat ini sangat tidak berpihak. Pasar yang seharusnya menjadi media untuk menampung dan menajaul hasil produksi baik pertanian maupun non pertanian saat ini kondisinya kurang dapat membantu

komunitas miskin. Akses masyarakat terhadap pasar kurang disebabkan oleh ketergantungan mereka pada tengkulak. Mereka tidak dapat menjual hasil pertaniannya langsung ke pasar karena tidak mempunyai informasi kepada siapa hasil pertanian bisa dijual,

Aspek keterisoliran juga menjadi masalah mendasar bagi masyarakat miskin. Keterisoliran dapat bersifat fisik dan psikis. Keterisoliran fisik terkait dengan infrastruktur, akses informasi, akses transportasi. Keterisoliran fisik yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: sarana dan prasaran yang tidak menunjang, seperti jalan yang berbatu dan becek. Kekurangan infrastruktur dapat menyebabkan transportasi mahal, sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk mengembangkan SDM-nya. Selain itu jarak yang jauh dari pusat kecamatan dan pusat ekonomi mengakibatkan akses informasi kurang. Keterisolasian psikologis ditunjukkan oleh keberadaan kelompok tani yang tidak berfungsi. Kelompok tani hanya berfungsi pada saat adanya proyek dan belum semua komunitas miskin ikut dalam kelompok, selain itu komunitas miskin belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga sosial yang ada seperti KUD, LKMD, Gapoktan, PKK, dan BPD juga belum berperan dalam merespon kebutuhan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan oleh kurangnya informasi, baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.

Kaitannya dengan potensi dan kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan pekerjaan responden sebagai petani tembakau, maka akan dipaparkan potensi dan kendala. Usia penduduk desa didominasi oleh penduduk berusia antara 17-50 tahun (55%). Tingkat pendidikan penduduk desa sebanyak 70% lulusan SD. Sementara itu mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani, buruh tani, dan swasta. Pertanian sayuran memiliki lahan

yang paling luas, yaitu sebanyak 34% dari total area pertanian yang ada, disusul oleh pertanian palawija, sayuran, dan tembakau.

METODE PENELITIAN

Kerangka Penelitian

Dalam kerangka proses penelitian pada dasarnya menggambarkan alur penelitian atau kajian yang akan dilaksanakan, sehingga tahapan kegiatan penelitian dapat bersifat sistematis. Kajian pertama diawali dengan kajian tentang keberadaan kegiatan para petani tembakau, dengan lebih banyak menggunakan data skunder. Kajian difokuskan pada kajian ekonomi, sosial budaya, kajian lingkungan, dan demografi yang dimaksudkan untuk mendapatkan lebih lengkap tentang karakteristik petani tembakau. Untuk lebih memperdalam kajian, maka dilakukan kajian tentang model pemberdayaan bagi petani tembakau.

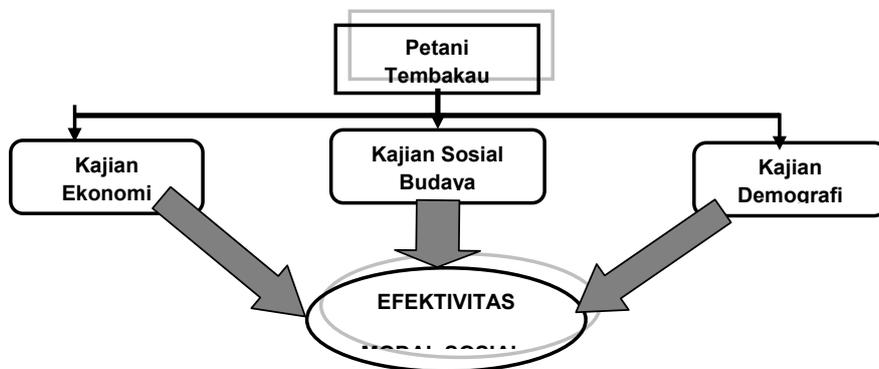
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *action research* yang menekankan pada *action* atau tindakan. Peneliti melakukan tindakan atau eksperimen yang secara khusus diamati secara terus menerus, dilihat kelebihan dan kekurangannya, kemudian diadakan perubahan terkontrol sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat (Suharsini, 2009). Ciri paling penting dalam action research adalah bahwa

penelitian merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah, sekaligus mencari dukungan ilmiahnya. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga pendekatan, yaitu: 1) *Participatory action research*; menekankan pada keterlibatan masyarakat agar merasa ikut memiliki program kegiatan serta berniat ikut aktif memecahkan masalah berbasis masyarakat. 2) *Critical action research*; dilakukan dengan menekankan adanya niat yang tinggi untuk bertindak memecahkan masalah dan menyempurnakan situasi. 3) *Institutional action research*; pengelola sebagai organisasi yang bertanggungjawab meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptifanalitis, dengan memfokuskan pada kajian-kajian tentang yang komprehensif dalam upaya mengembangkan pasar tradisional menjadi pasar sehat. Berbagai kajian difokuskan pada empat variabel, yaitu variabel kajian organisasi dan SDM, variabel kajian hukum, variabel kajian stakeholders, dan variabel benchmarking.

Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara studi literatur, observasi responden, metode wawancara dengan pengelola pasar, pedagang, pembeli, dan asosiasi pedagang secara terstruktur dan wawancara mendalam (*indeep interview*). Keseluruhan metode tersebut akan dibantu dengan software *Statistical Program for Sosial Analysis* (SPSS) untuk mempermudah



Gambar 2
KERANGKA PENELITIAN

dalam menganalisis data.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian antara lain: profil petani tembakau, kajian ekonomi, kajian sosial budaya, kajian demografi, dan modal sosial (kompetensi SDM, manajemen sosial, organisasi sosial, dan kepemimpinan).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok obyek yang akan diteliti, dan dapat berupa orang, benda, kegiatan, kelompok dll. Sementara sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil hendaknya memenuhi syarat *accuracy* dan *precision*. Sampel yang akurat diindikasikan dengan pengambilan sampel dengan jumlah yang tepat, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sedangkan syarat *precision* dimaksudkan bahwa sampel yang diambil nantinya dapat mewakili populasi sebagai fungsi generalisasi populasi. Jumlah sampel sebanyak 104 orang, yang terdiri dari 80 petani tembakau, 16 tokoh masyarakat, 16 perangkat desa, dan 2 orang perangkat kecamatan. Adapun sampel diambil dari delapan desa yang ada di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ke delapan desa tersebut adalah: Desa Tlogomulyo, Damar Kasian, Pagerejo, Candimulyo, Purbosono, Candiyasan, Kapencar, dan Reco.

Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama (*first hand*). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua (*second hand*). Data primer terdiri dari data yang diperoleh dari responden (petani tembakau, observasi langsung, wawancara mendalam, dan focus group discussion. Sementara data sekunder diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan, misalnya: Wonosobo dalam

angka, internet, teksbook, jurnal, data-data dari kecamatan, Bappeda, dan Dinas-dinas terkait.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, pendidikan, dan usia. Sementara analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kondisi sosial budaya masyarakat, perilaku masyarakat, kajian lingkungan. Pendekatan kualitatif dilakukan setelah mendapatkan data dari interview yang mendalam terhadap responden, observasi terlibat, dokumentasi tertulis, dan focus group discussion (FGD). Data indepth interview terdiri atas kutipan langsung mengenai pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuan subyek. Data observasi terdiri dari uraian rinci aktivitas penelitian atau program, perilaku partisipan, dan interaksi antar manusia yang dapat menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman penelitian. Analisis dokumen menghasilkan kutipan, korespondensi, dan laporan-laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini responden penelitian terdiri dari: petani tembakau, aparat kecamatan, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Para responden berasal dari delapan desa di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kedelapan desa meliputi: desa Tlogomulyo, Damar Kasian, Pagerejo, Candimulyo, Purbosono, Candiyasan, Kapencar dan Reco. Sementara itu komposisi responden terdiri dari: petani tembakau berjumlah 80 orang, aparat desa berjumlah 16 orang, tokoh masyarakat 16 orang, dan pemerintah kecamatan dua orang (Camat dan Sekretaris Camat). Berbagai modal sosial yang diidentifikasi meliputi: Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, Kelompok tani, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Modal sosial di pedesaan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk meningkatkan peran mereka dalam berbagai kegiatan, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Berbagai sarana modal sosial yang ada sebenarnya telah memberikan media bagi masyarakat desa untuk bergabung dalam rangka memikirkan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata frekwensi pertemuan warga desa di Kecamatan Kertek adalah 35 hari sekali atau selapanan, untuk kelompok modal sosial BPD, Koperasi, Kelompok tani, PKK, dan BUMDes. Walaupun demikian ada beberapa modal sosial yang frekwensi pertemuannya tiga bulan sekali, misalnya pertemuan LKMD dan Gapoktan. Frekwensi pertemuan yang cenderung rutin setiap bulannya mengindikasikan bahwa modal sosial yang ada di Kecamatan Kertek sebenarnya merupakan modal yang kuat bagi masyarakat pedesaan sebagai bentuk kepercayaan diantara warga desa. Menurut Pranaji (2006), terbentuknya saling percaya adalah hasil interaksi yang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetangaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Pada suatu masyarakat ketetangaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif. Saling percaya diantara anggota organisasi sebagai dasar untuk menciptakan daya tangga diantara anggota, dan juga dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bersama.

Nilai-nilai kepercayaan dan daya tanggap di antara anggota akan menimbulkan kerjasama dan solidaritas. Nilai kepercayaan diantara anggota dan keuntungan bersama akan menciptakan jaringan dan kebijakan. Sementara daya tanggap dan keuntungan bersama akan menciptakan persaingan dan keberlangsungan usaha.

Modal Sosial dan Produktivitas

Sebagai keunggulan dalam pengelolaan modal sosial di Kecamatan Kertek adalah frekwensi pertemuan dari para anggota cenderung rutin, yaitu setiap sebulan sekali. Tingkat kehadiran masyarakat desa juga sangat tinggi, setiap pertemuan rata-rata dihadiri oleh 44 orang, dengan jumlah terbesar yang hadir pada modal sosial Gapoktan, koperasi, dan BPD. Adapun materi pertemuan dan diskusi untuk masing-masing kelompok modal sosial berbeda-beda. Badan Perwakilan Desa dalam pertemuannya lebih menekankan permasalahan pada tingkat desa, misalnya: pertanian, peternakan, pembuatan pupuk organik, harga tanaman pada tingkat petani, kesuburan tanaman tembakau, cara menanam tembakau, cara memupuk tembakau, perkembangan pemerintahan desa, membahas kemajuan pembangunan desa. Sementara untuk Gapoktan diskusi difokuskan pada: peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, pemanfaatan pupuk organik dan pupuk caik, pengadaan benih, pupuk, perawatan pembibitan jagung, pengolahan limbah atau kotoran sapi, penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, manajemen panen, pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi, dan evaluasi pinjaman. Dalam modal sosial LKMD, menekankan pada pembicaraan tentang pembangunan jalan, prioritas pembangunan di desa, peningkatan kompetensi SDM desa, membahas program pembangunan desa, rencana kerja desa, dan evaluasi kerja pembangunan desa. Pada tataran ibu-ibu, di desa telah ada PKK yang memfokuskan pada bagaimana

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai modal sosial di desa, kegiatan PKK dilakukukan setiap bulan sekali, dengan kegiatan meliputi: penyuluhan pola hidup sehat dan bersih, bersih lingkungan, membaca yasin dan tahlil, posyandu, mengatasi gizi buruk, dan peningkatan ketrampilan ibu dan anak.

Modal sosial dalam suatu negara merupakan penentu utama dalam komposisi dan pertumbuhan dari output dan ekspor negara. Sebagai contoh: kesehatan dan makanan yang cukup akan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, masyarakat pedesaan. Dalam bidang pertanian terbukti bahwa terdapat dampak positif modal sosial terhadap produktivitas diantara para petani yang menggunakan teknologi modern, dibanding dengan penggunaan metode tradisional. Di Thailand, petani yang menempuh pendidikan empat tahun atau lebih memiliki tiga kali kemungkinan mengadopsi dapat mengadopsi input-input modern dibanding dengan yang berpendidikan rendah (Birdsall, 1993). Modal sosial juga sangat penting kontribusinya terhadap kapasitas teknologi dan perubahan teknis dalam industri. Ottoson and Klyver (2010), dalam penelitiannya tentang dampak modal manusia terhadap modal sosial dengan responden para entrepreneur menunjukkan bahwa keduanya saling menciptakan kerjasama yang produktif, dan peningkatan peningkatan kualitas human capital akan meningkatkan pula level sosial capital dengan seketika. Becker (1993) menyatakan bahwa konsep modal manusia (level pendidikan, *self efficacy*, dan pengalaman) mengacu pada sebuah investasi sehingga seseorang mengharapkan pengembalian secara ekonomi. Modal manusia merupakan sebuah terminologi ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan atribut-atribut produktif dari seseorang. Kajian tentang human capital telah banyak dilakukan, dan implikasinya dalam bentuk pendidikan, manajemen, industri, dan entrepreneurship.

Modal manusia menggunakan tiga faktor, yaitu level pendidikan, *self efficacy*, dan pengalaman, sementara variabel sosial capital menggunakan indikator kepercayaan, join nilai atau norma, dan sumberdaya sosial yang mendukung struktur sosial.

Modal sosial dalam masyarakat hendaknya dipahami bahwa di dalam suatu komunitas terdapat keragaman (agama, budaya, kepentingan, status sosial, pendidikan, pendapatan, keahlian, gender) dari anggotanya, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap keragaman tersebut. Sementara itu pemahaman nilai-nilai, norma menjadi hal yang penting. Unsur-unsur penting dalam modal sosial antara lain; rasa memiliki diantara anggota, jaringan kerjasama, rasa kepercayaan dan jaminan keamanan para anggota, saling memberi satu sama lain, saling berpartisipasi, dan bersikap proaktif.

Modal sosial dan Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai modal sosial yang ada di pedesaan disinyalir telah mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat pedesaan dengan mendasarkan pada prinsip kepercayaan, saling mendukung, dan keuntungan bersama. Ketiga prinsip ini pada dasarnya sudah dimiliki oleh masyarakat desa sebagai modal sosial. Namun demikian untuk mencapai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, keberadaan modal sosial masih perlu ditingkatkan perannya dengan melibatkan masyarakat desa secara proaktif. Masyarakat telah merasakan manfaat adanya modal sosial, seperti: bertambahnya wawasan, pengalaman, kerukunan, swadaya masyarakat semakin meningkat, kelestarian lingkungan, kesehatan balita, persatuan antara warga, tukar pengalaman, kekompakan, silaturahmi, kesinambungan program, meningkatkan komunikasi, aspirasi masyarakat tertampung, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Fukuyama (2000) menyatakan bahwa modal sosial ditransmisikan melalui

mekanisme-mekanisme cultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial lebih menekankan pada komunitas moral dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan seperti: kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*. Easterling (2009) menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial tinggi akan memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, ekonomi lebih kuat, dan system lebih baik untuk pendidikan dan kepedulian kepada anak muda. Berbagai bukti empirik bahwa masyarakat dengan *level sosial capital* yang lebih tinggi akan menciptakan berbagai keuntungan. Pencapaian peningkatan yang signifikan dalam sosial capital membutuhkan dukungan sikap, perilaku, struktur, norma, dan budaya. Untuk mewujudkannya perlu pemahaman terhadap dua permasalahan penting, pertama tentang strategi apa yang akan digunakan untuk meningkatkan peran sosial capital. Kedua siapa yang akan memerankan sebagai pemimpin. Konsep *community foundation leadership team* (CFLT) memiliki peran besar dalam kepemimpinan masyarakat, melalui tiga asset: pertama memiliki misi yang berhubungan langsung dengan perbaikan masyarakat yang lebih besar. Kedua kelompok masyarakat memiliki *knowledge* dalam pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Ketiga kelompok masyarakat secara umum memiliki kredibilitas diantara anggotanya. Kombinasi antara misi, *knowledge*, dan kredibilitas berdampak pada posisi kelompok masyarakat dapat memobilisasi masyarakat lokal.

Abdullah dkk (2011), menyatakan bahwa kepercayaan dan kerjasama memediasi hubungan antara kontrak psikologikal dan *sharing knowledge*. Ali dkk (2011), konsep sosial capital sebagai penentu penting dalam pengembangan ekonomi dan menjadi daya tarik para ekonom. Sosial capital juga sebagai factor dasar dalam pembangunan. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat mencapai keberlangsungan ekspansi ekonomi tanpa melakukan investasi dalam

human capital. Sosial capital merupakan sebuah norma informal yang mengandalkan kerjasama diantara anggotanya, dan dapat memperkaya pemahaman orang-orang terhadap dirinya sendiri dan dunia. Sosial capital dapat memperbaiki kualitas hidup dan mengarah pada keuntungan sosial yang lebih luas kepada individu dan masyarakat. *Sosial capital* mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan mempromosikan *entrepreneurship* dan keunggulan teknologi, yang pada akhirnya berperan dalam keamanan ekonomi dan sosial dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Semenjak abad-19 investasi yang sistematis pada *human capital* sudah bukan pertimbangan penting di beberapa Negara. Pembiayaan untuk pendidikan, *on-the-job training*, dan bentuk-bentuk lain dari investasi sudah mendapatkan perhatian yang kecil. Selanjutnya pada abad-20 sudah terjadi perubahan yang radikal dengan mengaplikasikan ilmu untuk pengembangan produk-produk baru dan metode-metode produksi yang efisien. Sejak abad-21, sosial capital, keahlian, dan akuisisi pengetahuan menjadi penentu penting dari produktivitas perorangan maupun nasional (Ali dkk, 2011).

Modal sosial dan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dan masyarakat sebagai indikator kesuksesan pembangunan di pedesaan menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan pembangunan. Modal sosial sebagai wahana dalam pencapaian kesejahteraan sosial hendaknya bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas bagi para warga, namun juga harus mampu menampung berbagai permasalahan dan melakukan pemecahan masalah. Permasalahan-permasalahan utama di pedesaan kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo dapat dibagi menjadi tiga masalah, yaitu: masalah alam, masalah sumber daya manusia, dan masalah manajemen. Masalah yang terkait dengan alam di Kabupaten Wonosobo yang memiliki dampak langsung terhadap para petani

tembakau adalah masalah cuaca yang kadang kurang mendukung, masalah hama perusak tanaman (jangkrik, belalang, keong, dan penyakit), busuk akar. Sementara itu masalah sumber daya manusia (SDM) terkait dengan kurangnya tingkat ketrampilan warga desa, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pertemuan-pertemuan, kurangnya disiplin dalam pengembalian pinjaman, rendahnya pendidikan masyarakat, kehadiran warga kurang dalam mengikuti pertemuan di desa. Permasalahan manajemen juga menjadi masalah yang sangat serius di kecamatan Kertek. Seperti manajemen permodalan yang digunakan untuk penanaman tembakau, manajemen pemasaran hasil pertanian, anggaran kegiatan PKK yang sangat minim.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tentunya perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah provinsi dan pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara untuk meningkatkan optimalisasi modal sosial. Cara pertama adalah dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhannya. Perlu juga dilakukan bimbingan dalam pemasaran hasil produksi, pelatihan-pelatihan teknis bertani dan bercocok tanam yang efektif, bantuan sarana dan prasarana (pupuk, alat rajang tembakau, obat-obatan), dan pelatihan terkait dengan akses modal bagi para petani.

Menurut laporan UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007-2008 menunjukkan bahwa kemajuan dalam pembangunan manusia (human development) di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1995 IPM mencapai 0,670, dan pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan menjadi 0,728. Sementara itu peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara

(Suharto, 2008). Indonesia dalam IPM tertinggal jauh dari Negara-negara Asean, misalnya: Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90). Capaian dalam IPM sangat berkorelasi dengan dimensi kesejahteraan, mengingat indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup dan kemampuan manusia, yang tercermin antara lain pada tingkat kualitas hidup, angka harapan hidup (dimensi umur panjang dan sehat), indikator angka melek huruf (dimensi pengetahuan), indikator kemampuan daya beli (dimensi layak hidup). Daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara umum masih berada di peringkat bawah. Laporan World competitiveness yearbook menyatakan bahwa sebelum krisis ekonomi (tahun 1997), Indonesia berada pada urutan ke-39. sementara pada awal abad ke-21, justru posisi Indonesia merosot pada urutan ke-46. Fukuyama (1995), menyatakan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu Negara. Negara-negara yang memiliki high trust societies, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan, sebaliknya low trust societies cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.

Fukuyama (1995, 1999) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Kunci keberhasilan modal sosial adalah *trust*, dengan *trust* orang-orang dapat bekerjasama dengan baik, dan tercipta prinsip bahwa adanya kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Trust merupakan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi bertahan. Modal sosial dapat bersifat eksklusif, yaitu hanya berlaku untuk kelompoknya saja, atau dapat bersifat inklusif, berlaku

bagi kelompok lain yang lebih luas. Kedua sifat tersebut berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Fukuyama menyatakan sedikitnya ada dua kontribusi utama modal sosial terhadap pembangunan, yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi politik. Secara ekonomi, fungsi modal sosial adalah untuk mengurangi biaya transaksi dikaitkan dengan mekanisme koordinasi formal, seperti kontrak, hirarki, aturan birokrasi, dan kepentingan. Secara politik, modal sosial dapat mendorong demokrasi yang diwujudkan dalam dinamika *civil society* yang beroperasi di dalam sikap saling percaya antar sesama warga, serta antara warga dan negara. Dalam Islam, menurut Mintarti (2003) terdapat kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama, dan dibangun atas dasar *ta'awun* (tolong menolong), *fakaful* (saling menanggung), dan *tadhomun* (memiliki solidaritas). Fukuyama (1999), negara atau pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penciptaan modal sosial melalui penyediaan *public goods* yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak hanya merupakan *instrument* yang bias menggeneralisasi modal sosial, melainkan pula mencerminkan adanya *good governance* dan *trust* antara Negara dan warga negara. Negara memberikan jaminan sosial kepada warganya sebagai timbal balik atas kepercayaan warga kepada negaranya dalam membayar pajak.

PENUTUP

Tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial, dan *community development*. Penguatan sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan skema-skema penguatan modal sosial, seperti peningkatan fungsi BPD, LKMD, Gapoktan, PKK, BUMDes, dan Koperasi. Penguatan sosial kapital dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga-

lembaga sosial dengan memfokuskan pada penguatan aspek kepercayaan, *mutual respect*, dan *mutual benefit*, serta memperhatikan faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku.

Dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat (bangsa) untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama, dimana kerjasama ini diwarnai oleh suatu pola inter-relasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Adapun kekuatan kerjasama ini akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

Implikasinya bahwa perlu adanya keragaman program-program yang dengan mengutamakan pada peningkatan kemampuan *human capital* dan sosial kapital masyarakat. Implikasi untuk *entrepreneurship* dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan mengkondisikan bahwa *human capital* dan *sosial capital* saling mendukung terhadap produktivitas dan kesejahteraan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui optimalisasi modal sosial harusnya didukung dengan kepemimpinan transformasional yang mampu mempengaruhi anggota masyarakat melalui perubahan *status quo*, meningkatkan kreativitas individual, memberikan inspirasi dan motivasi, serta memiliki idealisme. Modal sosial hendaknya didukung pula oleh *human capital* yang mampu memberikan inovasi-inovasi para anggota masyarakat. Program pendampingan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan ketrampilan bertani, dan

meningkatkan diversifikasi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamzah, Arshad (2011), Psychological contact and knowledge sharing among academicians: Mediating role of relational sosial capital. *International business research*, vol. 4, No. 4 October 2011
- Ali, Naseem, and Farooq (2011), Sosial capital impact on economic development (A theoretical perspective). *International Journal Business*
- Ali, Naseem, dan Farooq (2011), Sosial capital impact on economic development (a theoretical perspective).
- Arikunto, Suharsimi (2009), *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktek*; PT Bina Aksara, Jakarta.
- Asmadi Elsa (2006), *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*; Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Chicago, University of Chicago Press.
- BPS (2006), *Tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006*. Berita resmi statistic BPS No. 47/IX/1 September 2006
- Budhi dan Ardian (2009), *Penyusunan Pedoman dan Pola Tetap (Blue Print); Pemberdayaan Petani Tembakau Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan di Kabupaten Wonosobo*
- Budhi dan Ardian A. (2009), *Kajian Potensi Sumber Daya Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo*. Laporan penelitian Kerjasama FE Unissula dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Callois and Aubert (2007), *Towards indicators of sosial capital for regional development issue: The case of French rural areas*. *Regional studies*, Vol 41.6, August 2007
- Cohen, S., Prusak L. (2001), *In Good Company: How Sosial Capital Makes Organization*
- Coleman, J (1999), *Sosial Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass:
- Darwin MM (2005), *Memanusiasiakan rakyat, penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan*. Benang Merah Yogyakarta.
- Easterling D (2009), *The leadership role of community foundations in building sosial capital*. *National civic review*. DOI: 10.1002/nrc.232. Winter 2008
- Esterling D. (2009), *The leadership role of community foundations in building sosial capital*. *National Civic Review*, winter 2009.
- Fukuyama, Francis (1995), *Trust: The sosial virtues and the creation of prosperity*. New York: the Free Press
- Javed, Kalid, and Arshad (2011), *Islamic concept of sosial welfare*. *Interdisciplinary journal of contemporary research in business*. Vol 3, No.2 June 2011
- Javed, Khalid, and Arshad (2011), *Islamic concept of sosial welfare*. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 3, No.2 June 2011
- Misbahul dkk. (2007), *Model-model kesejahteraan sosial Islam: Perspektif normative, filosofis, dan praktis*. PT LliS Pelangi Aksara, Bantul Yogyakarta
- Ottoson and Klyver (2010), *The effect of human capital on sosial capital among entrepreneurs*. *Journal of enterprising culture*. Vol 18, No.4 (December 2010)
- Paper, WP/00/74, 1-8. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. (2003), *Foundation of Sosial Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2006), *Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2010*
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2006), *Strategi penanggulangan kemiskinan daerah*
-
- Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan..... (Budhi Cahyono) 15

- (SPKD) Kabupaten Wonosobo.
- Pranaji (2006), Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24, No. 2, Oktober 2006
- Prawiranegara (2009), Kajian model potensi ekonomi industri masyarakat berbasis agro technopark (ATP): Studi kasus daerah transmigrasi local Koleberes, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.
- Quillian and Redd (2006), Can sosial capital explain persistent racial poverty gaps ? National poverty center working paper series. June 2006
- Solow, R. M. (1999), Notes Sosial Capital and Economic Performance. In Partha D., Ismail S., Suharto E (2005), Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Alfabeta Bandung.
- Suharto E (2005), Pembangunan, kebijakan sosial, dan pekerjaan sosial. Spectrum Pemikiran, Bandung.
- Suharto E. (2008), Islam, modal sosial dan pengentasan kemiskinan. Indonesia sosial economic outlook, Dompet Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008
- Supriono, Flassy dan Rais (2008). Modal sosial: definisi, dimensi, dan tipologi
- Yazdani and Yaghoubi (2011), The relationship between sosial capital and organizational justice. *European journal of economics, finance and administrative science*. ISSN 1450-2275 issue 30
- Yoon and Wang (2011), The role of citizenship behaviors and sosial capital in virtual communities. *Journal of computer information systems*. Fall 2011